

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan karakter merupakan aspek esensial dalam sistem pendidikan di sekolah dasar karena berperan penting dalam membentuk kepribadian siswa yang memiliki nilai moral, sikap etis, dan kecerdasan sosial dalam kehidupan nyata. Pada konteks era kontemporer yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, globalisasi, teknologi, dan arus informasi yang masif, pendidikan karakter menjadi kebutuhan utama untuk menghadapi berbagai tantangan perilaku siswa yang semakin kompleks. Dalam telaah literatur yang komprehensif, Nurazizah & Junaidi (2025) menegaskan bahwa *“pendidikan karakter harus dikembangkan secara holistik dalam lingkungan sekolah agar mampu membentuk perilaku moral dan etika siswa secara menyeluruh”* karena pendekatan parsial hanya akan menghasilkan internalisasi nilai yang dangkal. Selain itu, Saputri, dkk (2025) dalam studi empiris mereka menemukan bahwa *“implementasi nilai-nilai karakter di sekolah dasar masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesopanan terhadap guru dan rendahnya kepedulian sosial siswa”*, yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran saat ini belum mampu menjembatani pemahaman nilai dengan praktik perilaku nyata. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pembelajaran dan pendekatan manajerial yang lebih efektif dan kontekstual dalam penanaman nilai karakter di lingkungan sekolah dasar.

Pentingnya pendidikan karakter juga mendapat sorotan dalam penelitian yang menekankan bahwa nilai moral individu tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi harus diintegrasikan secara kontekstual melalui budaya sekolah, kebiasaan harian, serta hubungan sosial dalam lingkungan pendidikan. Yulia dkk. (2025) secara tegas menyatakan bahwa *“pendidikan karakter melalui budaya sekolah dilaksanakan melalui proses habituasi, kegiatan terprogram, pengembangan bakat dan minat siswa, serta keteladanan seluruh warga sekolah sehingga mampu membentuk karakter seperti kerja sama, kemandirian, dan kemampuan berpikir*

kritis pada siswa”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya sekolah memiliki peran strategis sebagai wahana internalisasi nilai karakter yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, Ramadhani, dkk. (2025) dalam studi mereka menyimpulkan bahwa pendidikan karakter yang holistik tidak hanya bertumpu pada aspek kognitif, tetapi harus mencakup pembiasaan nilai-nilai positif seperti empati, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini melalui pembiasaan yang konsisten, kolaborasi antara sekolah dan keluarga, serta penerapan metode pembelajaran yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar masih cenderung bersifat normatif dan terbatas pada penyampaian nilai secara verbal, tanpa diikuti pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan secara konsisten. Akibatnya, nilai-nilai karakter yang diajarkan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku nyata siswa. Alimuddin (2023) menegaskan bahwa *“pendidikan karakter, termasuk pendidikan antikorupsi, belum terintegrasi secara utuh dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan masih bersifat konseptual dan belum tercermin dalam perilaku keseharian siswa*”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih diposisikan sebagai muatan tambahan, bukan sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Parmini et al. (2024) menyatakan bahwa pendidikan karakter akan lebih efektif apabila dirancang secara kontekstual dengan mengaitkan nilai-nilai moral dengan kearifan lokal dan kebiasaan sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman nyata. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan strategi pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan agar nilai-nilai karakter dapat terintegrasi secara utuh dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta pembentukan budaya dan iklim sekolah yang mendukung.

Dengan demikian, pendidikan karakter di sekolah dasar tidak dapat dipandang sebagai kegiatan tambahan atau sekadar muatan kurikuler, tetapi harus

dikelola secara sistematis melalui strategi manajemen sekolah yang komprehensif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten. Hal ini penting karena tanpa manajemen yang baik, pendidikan karakter berpotensi tetap bersifat simbolik dan kurang berdampak nyata pada pembentukan kebiasaan moral siswa yang tahan uji dalam kehidupan nyata.

Kondisi pendidikan karakter yang belum optimal sebagaimana dipaparkan sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat dengan urgensi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di sekolah dasar sebagai bagian integral dari pembentukan karakter siswa sejak dini. Korupsi pada hakikatnya bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan persoalan moral dan karakter yang berakar pada lemahnya internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai melalui pendidikan nilai secara sistematis sejak jenjang pendidikan dasar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter yang bertujuan membangun budaya integritas dan sikap antikoruptif siswa melalui pembiasaan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Wibowo dan Suyanto (2025) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah dasar berfungsi sebagai fondasi moral preventif yang menanamkan nilai integritas melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan berkelanjutan, bukan sekadar penyampaian konsep normatif. Mereka menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pendidikan karakter mampu membentuk kesadaran moral siswa untuk menolak perilaku tidak jujur, tidak adil, dan penyalahgunaan tanggung jawab sejak usia dini. Pendapat ini diperkuat oleh Sari dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan karakter sekolah yang mencakup pembelajaran di kelas, pembiasaan budaya sekolah, serta keteladanan seluruh warga sekolah.

Lebih lanjut, penelitian empiris Rahmawati dan Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa lemahnya implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah

dasar disebabkan oleh belum terintegrasinya nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dalam perencanaan pembelajaran, kurangnya pemahaman guru mengenai konsep pendidikan antikorupsi, serta belum optimalnya pembiasaan nilai integritas dalam budaya sekolah. Akibatnya, pendidikan anti korupsi cenderung bersifat simbolik dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan perilaku antikoruptif siswa. Padahal, menurut Hidayat dan Nurhadi (2024), pendidikan anti korupsi yang efektif harus dikelola secara manajerial melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan serta diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter utama yang relevan dengan perkembangan siswa sekolah dasar.

Dengan demikian, pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan kepribadian siswa. Pendidikan karakter tanpa penguatan nilai antikorupsi berpotensi menghasilkan individu yang bermoral secara umum, namun kurang memiliki sensitivitas terhadap praktik koruptif dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, pendidikan anti korupsi tanpa landasan pendidikan karakter yang kuat berisiko hanya menghasilkan pemahaman konseptual tanpa internalisasi nilai dalam perilaku nyata. Oleh karena itu, integrasi pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi melalui manajemen sekolah yang komprehensif menjadi kebutuhan strategis dalam membentuk generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan beretika sejak usia dini.

Meskipun konsep pendidikan anti korupsi telah diakui secara luas sebagai bagian integral dari pendidikan karakter, realitas pelaksanaannya di sekolah dasar menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan praktik di lapangan. Menurut Ananda dkk. (2025), pendidikan nilai anti korupsi merupakan upaya preventif strategis yang dapat membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas melalui pengenalan nilai-nilai moral sejak dini. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa implementasinya masih sering bersifat normatif dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kegiatan pembelajaran serta budaya sekolah.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian Andi Setiawan (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun pendidikan anti korupsi dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, pendekatan ini belum diterapkan secara konsisten di banyak sekolah dasar, sehingga berdampak pada lemahnya pembentukan sikap antikorupsi dalam perilaku nyata siswa.

Kesenjangan ini juga dapat dipahami dari perspektif teori pembentukan karakter dan pendidikan moral. Studi yang memadukan teori moral dan pendidikan integritas menegaskan pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter siswa yang memiliki kesadaran moral terhadap konsekuensi perilaku koruptif, termasuk melalui penguatan kemampuan berpikir etis dan nilai integritas. Namun, dalam praktiknya, pendidikan anti korupsi masih sering ditempatkan sebagai materi tambahan di luar kurikulum utama, sehingga kontribusinya terhadap internalisasi karakter menjadi terbatas.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan pemahaman guru dan efektivitas model pembelajaran yang digunakan. Penelitian Firmansyah & Gianistika (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan anti korupsi meningkat ketika materi dikaitkan dengan kasus nyata yang relevan dengan pengalaman siswa. Namun, pendekatan ini belum umum dipraktikkan di banyak sekolah dasar karena keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, dan perencanaan kurikulum yang belum memadai.

Karena itu, dalam pendidikan anti korupsi terletak pada rendahnya tingkat integrasi antara teori (nilai) dan praktik (perilaku) dalam kehidupan sekolah sehari-hari, termasuk dalam pembuatan rencana pembelajaran, keteladanan guru, kegiatan pembiasaan, dan evaluasi yang berfokus pada perilaku nyata siswa. Gap ini menegaskan perlunya perbaikan manajerial pendidikan anti korupsi secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar pendidikan ini benar-benar mampu menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi yang tahan uji dalam kehidupan nyata siswa.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang signifikan dalam implementasi pendidikan anti

korupsi di sekolah dasar. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter secara umum, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai universal seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Meskipun pendekatan tersebut penting, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan model pendidikan anti korupsi yang kontekstual, berakar pada budaya lokal, serta relevan dengan pengalaman keseharian siswa (Nurazizah & Junaidi, 2025; Saputri dkk., 2025).

Para pakar pendidikan karakter kontemporer secara konsisten menegaskan bahwa internalisasi nilai akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan budaya lokal dan praktik sosial siswa. Landena & Leobisa (2026) dalam studi mereka menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai moral secara nyata melalui pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, termasuk melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keterlibatan lingkungan sosial sekolah. Selain itu, Irsan dkk. (2023) menemukan bahwa internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai karakter berbasis budaya lokal di sekolah dasar berjalan efektif ketika budaya lokal menjadi bagian yang hidup dalam rutinitas sekolah, termasuk dalam program pembiasaan, kegiatan kelas, dan kehidupan luar kelas. Temuan-temuan ini memperkuat pandangan bahwa nilai moral akan lebih mudah terinternalisasi dan bermakna ketika pendidikan karakter berakar pada konteks budaya lokal yang nyata bagi siswa.

Namun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dengan kearifan lokal masih relatif terbatas, terutama pada jenjang sekolah dasar. Beberapa penelitian telah mengkaji kearifan lokal sebagai sumber nilai karakter (Parmini, dkk. 2024; Satria, dkk 2025), tetapi belum banyak yang mengaitkannya secara eksplisit dengan pendidikan anti korupsi sebagai upaya preventif pembentukan budaya integritas sejak dini. Selain itu, penelitian yang ada cenderung berhenti pada tahap identifikasi nilai-nilai lokal, tanpa mengembangkan model implementasi

pendidikan anti korupsi yang sistematis dan terukur dalam konteks manajemen sekolah, pembelajaran, dan budaya sekolah.

Dalam konteks inilah, pendekatan kearifan lokal Pancawaluya menjadi sangat krusial. Pancawaluya sebagai sistem nilai lokal Sunda mengandung prinsip-prinsip moral yang selaras dengan nilai antikorupsi, seperti kejujuran (*someah jeung jujur*), tanggung jawab terhadap amanah, disiplin, kepedulian sosial, kerja sama, dan keadilan (Sofyan, Sundawa, & Wutsqah, 2026). Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi hidup dalam praktik sosial dan budaya masyarakat, sehingga memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan pendidikan anti korupsi yang kontekstual dan bermakna bagi siswa sekolah dasar.

Lebih lanjut, penguatan pendidikan anti korupsi melalui enam sistem nilai yang terintegrasi memberikan kerangka konseptual yang lebih operasional dalam pembentukan karakter siswa. Kohlberg dalam berbagai kajiannya tetap menunjukkan bahwa perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman konkret dan pembiasaan nilai dalam lingkungan sosialnya, sehingga pengelompokan nilai antikorupsi ke dalam sistem nilai yang jelas akan memudahkan proses internalisasi dan evaluasi perubahan sikap serta perilaku siswa. Namun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian yang mengintegrasikan kearifan lokal Pancawaluya dengan enam sistem nilai antikorupsi dalam satu kerangka pendidikan yang utuh dan dikelola secara manajerial masih sangat terbatas, sehingga membuka ruang penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal Pancawaluya dan enam sistem nilai dikelola dan diimplementasikan secara sistematis di sekolah dasar. Keterbatasan penelitian sebelumnya dalam mengaitkan aspek budaya lokal, nilai antikorupsi, dan manajemen pendidikan karakter menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian semacam ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan karakter dan

pendidikan anti korupsi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan sejak usia dini.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat internalisasi nilai moral dan sosial siswa, terutama bila nilai-nilai budaya lokal diintegrasikan secara kontekstual dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Pendidikan berbasis kearifan lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran budaya, tanggung jawab sosial, dan identitas moral siswa, serta menjembatani kesenjangan antara norma pendidikan dan praktik sosial di lingkungan pendidikan (Gaffar, dkk., 2025).

Namun demikian, riset yang ada umumnya masih fokus pada integrasi kearifan lokal dalam pendidikan karakter umum, seperti gotong royong, toleransi, dan identitas budaya, tanpa secara spesifik mengkaji *kearifan lokal sebagai basis pendidikan anti-korupsi* yang konkret dan terstruktur sejak jenjang sekolah dasar. Padahal, penelitian seperti Hallatu (2025) telah menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal—seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama—berkorelasi langsung dengan nilai anti-korupsi dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat karakter antikoruptif siswa apabila dijadikan sumber belajar dan budaya sekolah.

Celah penting lainnya adalah bahwa sebagian besar studi masih bersifat deskriptif atau eksploratif pada satu wilayah budaya tertentu tanpa mengembangkan model pendidikan antikorupsi yang terukur berdasarkan nilai-nilai lokal yang sistematis dan komprehensif seperti *Pancawaluya dan enam sistem nilai*. Secara konseptual, *Pancawaluya* (atau nilai lokal setara lainnya) merupakan kumpulan nilai yang berakar kuat pada konteks budaya masyarakat setempat, namun belum banyak diteliti sebagai basis struktural dalam model pendidikan anti-korupsi. Integrasi nilai-nilai budaya yang spesifik ini dapat menutup gap antara kebijakan pendidikan karakter nasional dan praktik yang tidak kontekstual di sekolah. Studi umum tentang kearifan lokal telah menegaskan bagaimana nilai lokal dapat memperkuat karakter siswa melalui pembelajaran yang relevan dan budaya sekolah yang hidup, tetapi belum ada penelitian yang menghubungkan langsung potensi ini dengan pendidikan anti-korupsi secara eksplisit dan sistematis.

Selain itu, riset di Indonesia menunjukkan bahwa kearifan lokal memungkinkan terjadi pembiasaan nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap kehidupan nyata siswa. Integrasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan penghormatan terhadap norma sosial—nilai-nilai yang sering muncul dalam kajian kearifan lokal—secara langsung relevan dengan kebutuhan *pendidikan anti-korupsi*, namun literatur empiris yang mengaitkan kedua domain ini masih sangat terbatas. Padahal, integrasi nilai kearifan lokal ke dalam pendidikan anti-korupsi akan menjadikan pendidikan ini lebih kontekstual, bermakna, dan mampu membentuk perilaku antikoruptif yang nyata dalam kehidupan siswa.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara eksplisit mengembangkan dan menguji model Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Pendekatan Kearifan Lokal Pancawaluya dan enam sistem nilai, sebagai jawaban terhadap celah penelitian yang masih ada. Pendekatan ini tidak saja menjawab kebutuhan teori dan praktik pendidikan karakter, tetapi juga membantu menjembatani kesenjangan antara nilai moral ideal dan perilaku siswa yang nyata, sehingga strategi pembelajaran dan pengelolaan sekolah dapat dirancang lebih efektif dan relevan secara budaya.

Penelitian tentang pendidikan anti korupsi menunjukkan bahwa pendidikan ini semakin dipandang sebagai komponen penting dalam pembentukan karakter moral siswa sejak dini. Berbagai studi di tingkat sekolah dasar telah menguatkan pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter, di mana pembelajaran anti korupsi ditanamkan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pendekatan diskusi, role play, dan pembiasaan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini. Namun, implementasi di tingkat SD pada umumnya masih bersifat normatif tanpa integrasi budaya setempat yang kuat, sehingga masih diperlukan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa.

Selain itu, penelitian juga telah mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif, seperti penggunaan metode *lesson study* dan *storytelling* untuk memperkuat pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa SD. Studi semacam ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan

keterlibatan siswa, tetapi masih terbatas pada metode pembelajaran tanpa kaitan eksplisit pada nilai lokal yang diwariskan masyarakat.

Dalam kajian pendidikan karakter kontemporer, tren riset menunjukkan pergeseran perhatian dari pendekatan normatif universal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kearifan lokal dalam pembentukan karakter siswa. Sebagai contoh, penelitian integrasi nilai Pancawaluya, suatu kearifan lokal Sunda yang meliputi lima nilai inti: *cageur* (sehat lahir batin), *bageur* (berbudi pekerti baik), *bener* (jujur dan bertanggung jawab), *pinter* (cerdas dan berhikmah), dan *singer* (aktif dan kreatif) — telah dibahas sebagai landasan pendidikan karakter yang kontekstual di Jawa Barat, yang mampu menguatkan identitas budaya sekaligus kompetensi moral siswa dalam pembelajaran formal.

Pemanfaatan kearifan lokal seperti Pancawaluya dalam pendidikan anti-korupsi menjadi relevan dan penting karena nilai-nilai tersebut secara mendasar sejalan dengan nilai-nilai universal anti-korupsi, yaitu jujur (*bener*), bertanggung jawab (*bageur*), dan kreatif dalam menyelesaikan masalah (*pinter*). Pancawaluya menawarkan *framework* nilai yang tidak hanya dapat memperkuat pendidikan karakter secara umum, tetapi juga dapat dijadikan fondasi normatif dan praktis dalam pendidikan anti-korupsi yang terkonkretkan melalui budaya sekolah dan praktik keseharian siswa.

Terlebih lagi, sebagian besar literatur pendidikan karakter anti-korupsi masih berfokus pada pendekatan teoritis atau integrasi nilai secara umum di kelas tanpa memanfaatkan sumber budaya kontekstual yang sudah hidup dalam komunitas siswa. Padahal, penelitian tentang *local wisdom* dalam pendidikan menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai budaya ke dalam pembelajaran mampu meningkatkan *meaningfulness* pembelajaran, keterlibatan siswa, serta internalisasi nilai moral yang lebih kuat dibanding pendekatan umum yang tidak berbasis budaya.

Oleh karena itu, riset yang mengembangkan model pendidikan anti-korupsi berbasis *kearifan lokal Pancawaluya* dan enam sistem nilai sangat krusial karena dapat menjembatani antara nilai pendidikan karakter secara umum dan praktik nyata yang dibutuhkan di sekolah dasar. Model ini tidak hanya memperkuat moral antikorupsi siswa melalui pendekatan budaya yang relevan dengan konteks sosial

mereka, tetapi juga menjawab kebutuhan akademik akan model pembelajaran yang lebih kontekstual, terukur, dan berbasis *ethnopedagogy* (pendidikan yang mengakar pada budaya lokal). Agaknya, *kearifan lokal Pancawaluya* memiliki potensial untuk menjadi landasan nilai inovatif yang mampu mengintegrasikan karakter antikorupsi ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah secara sistematis, sehingga menjembatani kesenjangan antara nilai anti korupsi sebagai teori dan perilaku antikorupsi sebagai praktik nyata dalam kehidupan siswa.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah dasar umumnya masih dikaji dalam kerangka pendidikan karakter secara umum dan belum dikembangkan secara spesifik melalui pendekatan manajerial berbasis kearifan lokal. Penelitian Nurazizah dan Junaidi (2025) dalam studi berjudul *“Pengembangan Pendidikan Karakter Holistik di Sekolah Dasar”* menegaskan pentingnya integrasi nilai karakter dalam budaya sekolah, namun belum secara khusus mengkaji pendidikan anti korupsi sebagai sistem nilai yang dikelola secara terstruktur. Demikian pula, Saputri dkk. (2025) melalui penelitian *“Implementasi Nilai-Nilai Karakter di Sekolah Dasar”* menemukan berbagai kendala perilaku siswa seperti rendahnya kesopanan dan kepedulian sosial, tetapi fokus kajiannya masih terbatas pada aspek implementasi nilai karakter tanpa menyoroti dimensi antikorupsi secara eksplisit.

Penelitian lain yang relevan, seperti Yulia dkk. (2025) dalam artikel *“Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di Sekolah Dasar”*, menekankan pentingnya habituasi, keteladanan, dan kegiatan terprogram dalam membentuk karakter siswa. Sementara itu, Ramadhani dkk. (2025) melalui studi *“Model Pendidikan Karakter Holistik di Sekolah Dasar”* menegaskan bahwa pendidikan karakter harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku melalui pembiasaan yang konsisten dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum mengaitkan pendidikan karakter dengan pendidikan anti korupsi secara sistematis dalam kerangka manajemen sekolah.

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, Alimuddin (2023) dalam penelitiannya *“Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran di*

Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi masih bersifat konseptual dan belum terinternalisasi dalam perilaku keseharian siswa karena belum terintegrasi secara utuh dalam budaya dan pengelolaan sekolah. Adapun penelitian berbasis kearifan lokal, seperti yang dilakukan oleh Parmini dkk. (2024) dalam artikel “*Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sekolah Dasar*”, menunjukkan bahwa kearifan lokal efektif dalam memperkuat nilai moral siswa, namun kajiannya belum secara spesifik diarahkan pada pendidikan anti korupsi maupun pengelolaannya secara manajerial.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara mendalam strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan kearifan lokal Pancawaluya dan enam sistem nilai ke dalam program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara komprehensif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di sekolah dasar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memandang pendidikan anti korupsi sebagai muatan normatif, pedagogis, atau sekadar integrasi nilai dalam pembelajaran, penelitian ini memposisikan pendidikan anti korupsi sebagai sistem nilai yang dikelola secara strategis dan berkelanjutan melalui kebijakan, budaya, dan praktik manajerial sekolah.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada transfer nilai secara kognitif, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan moral melalui pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah yang konsisten. Integrasi kearifan lokal Pancawaluya dan enam sistem nilai dalam kerangka manajemen sekolah dipandang relevan dan strategis karena nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, dan integritas, sekaligus dekat dengan konteks sosial-budaya kehidupan siswa. Dengan pendekatan ini, nilai antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi dihidupkan dalam praktik keseharian warga sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas kajian pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi berbasis

kearifan lokal, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dan praktis berupa model strategi manajemen sekolah yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan budaya lokal siswa. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah dasar dan pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan anti korupsi yang lebih sistematis, bermakna, dan berdampak nyata terhadap penguatan karakter siswa sejak usia dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada program pendidikan anti korupsi dalam rangka penguatan karakter siswa sekolah dasar di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Purwakarta. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dalam budaya dan aktivitas sekolah.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal, baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, kebijakan sekolah, maupun dukungan lingkungan sosial dan budaya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model manajemen pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal Pancawaluya yang kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan sebagai upaya penguatan karakter siswa sekolah dasar.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

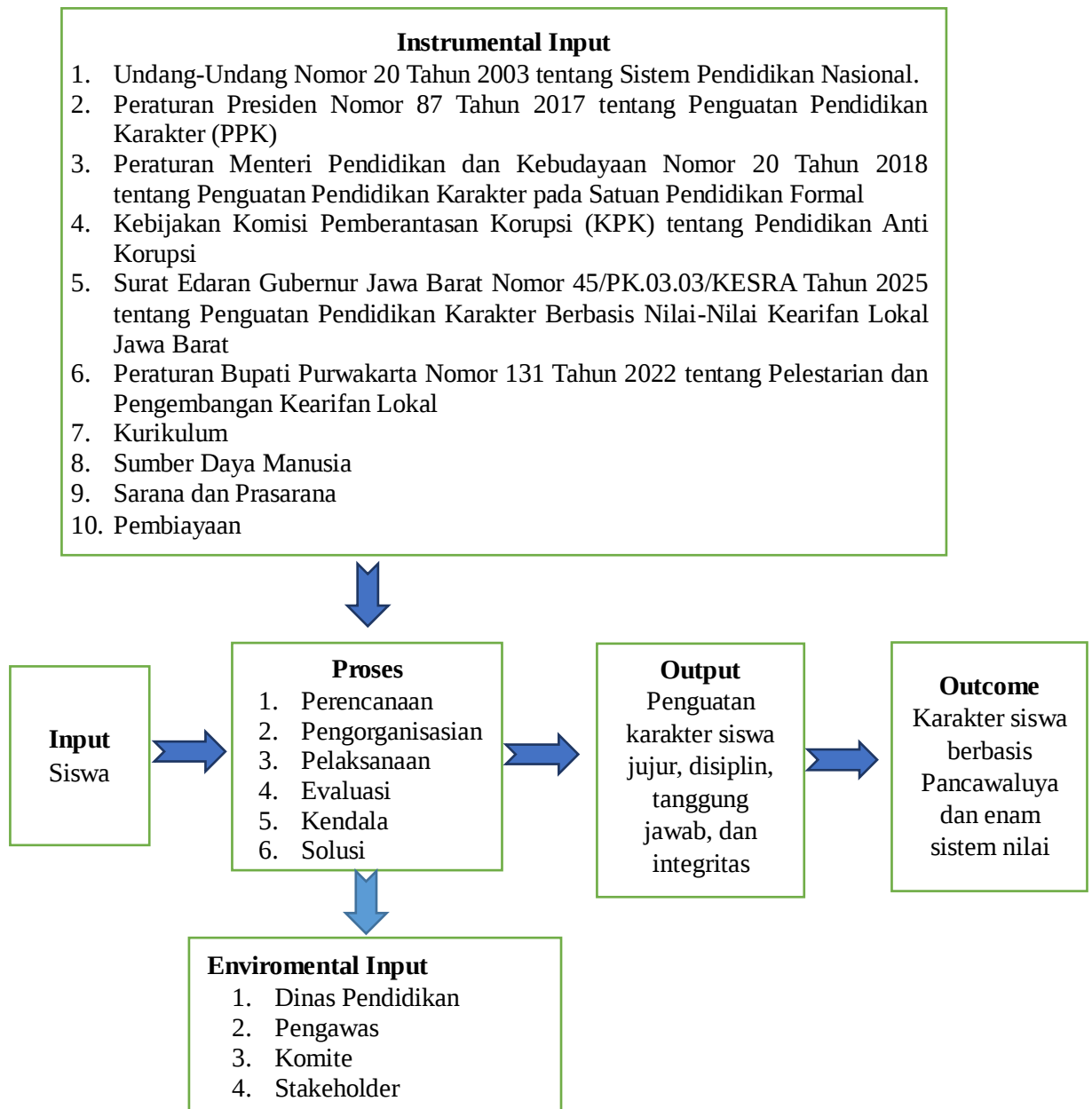
Akar permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk penguatan karakter siswa di tingkat sekolah dasar, khususnya di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered, Purwakarta. Permasalahan ini mencakup seluruh aspek manajemen, mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program, yang belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai karakter lokal dan kebijakan pendidikan karakter daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, perlu ditelaah pula faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen program PAK berbasis Pancawaluya. Hal ini terlihat dari hasil pendidikan karakter yang diperoleh melalui program-

program sekolah yang belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari segi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, maupun integritas siswa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini secara sistematis dan divisualisasikan pada bagan berikut sebagai acuan dalam memahami fokus dan ruang lingkup penelitian.



Bagan 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan bagan rumusan masalah, arah utama penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya ke dalam Program Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya penguatan karakter siswa di sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Kabupaten Purwakarta, yang dipilih sebagai lokus penelitian

karena memiliki karakteristik sosial-budaya yang merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Purwakarta serta komitmen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan antikorupsi.

Rumusan masalah penelitian ini dibangun atas kerangka sistem manajemen pendidikan yang mencakup raw input, instrumental input, dan environmental input. *Raw input* dalam penelitian ini merujuk pada siswa sebagai subjek utama pendidikan, yang memiliki potensi dasar, latar belakang sosial-budaya, serta nilai-nilai awal kearifan lokal yang relevan dengan enam sistem nilai Pancawaluya. Potensi tersebut menjadi modal awal dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di sekolah.

Selanjutnya, instrumental input mencakup berbagai perangkat pendukung yang digunakan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancawaluya dan pendidikan antikorupsi, antara lain kebijakan sekolah, kurikulum, regulasi pendidikan, program sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan strategi manajemen sekolah.

Sementara itu, environmental input meliputi faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program, seperti peran Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mendukung penguatan karakter siswa berbasis nilai-nilai lokal dan antikorupsi.

Ketiga komponen *input* tersebut diproses melalui strategi manajemen sekolah yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan solusi perbaikan dalam pengintegrasian enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi. Proses manajemen ini diarahkan untuk menghasilkan output berupa penguatan karakter siswa yang mencerminkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta integritas.

Lebih lanjut, *outcome* yang diharapkan dari strategi manajemen tersebut adalah terbentuknya karakter siswa yang berlandaskan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya sebagai sistem nilai yang hidup dan membudaya dalam kehidupan sekolah. Apabila *output* dan *outcome* yang dihasilkan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka hasil tersebut dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek *input* maupun proses manajemen.

Dengan demikian, strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi dipahami sebagai proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang menjadi komitmen strategis sekolah dalam membangun karakter siswa secara holistik, melalui sinergi antara nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi dalam seluruh aktivitas sekolah

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai manajemen kearifan lokal dalam Program Pendidikan Anti Korupsi, penelitian ini memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang tersusun atas beberapa komponen yang saling berkaitan. Sebagaimana tergambar dalam bagan rumusan masalah, sistem tersebut meliputi komponen *input*, proses, *output*, dan *outcome* yang bekerja secara berkesinambungan dalam konteks penguatan karakter siswa berbasis Pancawaluya di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Kabupaten Purwakarta.

a. Komponen

Komponen input merupakan unsur awal yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan manajemen kearifan lokal pada Program Pendidikan Anti Korupsi. Dalam penelitian ini, komponen input terdiri atas tiga bagian utama, yaitu *raw input*, *instrumental input*, dan *environmental input*, yang secara bersama-sama membentuk kesiapan sistem pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi berbasis budaya lokal.

Raw input merujuk pada siswa sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Siswa dipahami sebagai individu yang telah membawa latar belakang nilai, sikap, dan kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, siswa menjadi penerima utama nilai-nilai antikorupsi yang dipadukan dengan kearifan lokal Pancawaluya (cageur, bageur, bener, pinter, dan singer) melalui berbagai aktivitas pembelajaran dan pembiasaan di sekolah. Oleh karena itu, kondisi dan karakter awal siswa sangat memengaruhi efektivitas proses manajemen yang dijalankan, karena perubahan karakter siswa menjadi indikator utama keberhasilan program.

Selanjutnya, *instrumental input* mencakup seluruh perangkat yang berfungsi sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal. Instrumen tersebut meliputi kebijakan pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam penelitian ini, kebijakan nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter, kebijakan KPK tentang Pendidikan Anti Korupsi, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 menjadi landasan normatif yang memberikan arah dan legitimasi terhadap implementasi program di sekolah. Selain itu, kurikulum dan metode pembelajaran berperan sebagai sarana strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Adapun *environmental input* meliputi seluruh unsur lingkungan yang mendukung proses pembentukan karakter siswa. Unsur ini mencakup peran Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya. Lingkungan sekolah dan masyarakat dipandang sebagai ruang sosial yang memungkinkan nilai-nilai antikorupsi dan kearifan lokal

diperkuat melalui keteladanan, pembiasaan, dan interaksi yang berkelanjutan. Sinergi antarunsur lingkungan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim pendidikan yang kondusif bagi penguatan karakter siswa.

Dengan demikian, ketiga jenis input tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pelaksanaan strategi manajemen sekolah dalam Program Pendidikan Anti Korupsi.

b. Komponen Proses

Komponen proses menggambarkan bagaimana seluruh input dikelola melalui strategi manajemen sekolah untuk menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sesuai dengan bagan rumusan masalah, proses manajemen dalam penelitian ini meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, identifikasi kendala, dan perumusan solusi.

Tahap perencanaan dilakukan dengan merumuskan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya. Perencanaan ini tercermin dalam penyusunan program pembelajaran, kegiatan pembiasaan, serta penguatan budaya sekolah yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa.

Tahap pengorganisasian berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab seluruh unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai pengelola strategi, guru sebagai pelaksana pembelajaran dan pembiasaan, hingga unsur pendukung lainnya. Pengorganisasian yang efektif memungkinkan terjalannya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari strategi yang telah direncanakan. Pada tahap ini, nilai-nilai antikorupsi diinternalisasikan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan

ekstrakurikuler, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari sekolah dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga pembentukan karakter berlangsung secara kontekstual dan bermakna bagi siswa.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan program, efektivitas strategi manajemen, serta perubahan sikap dan perilaku siswa. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam merumuskan solusi dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Dengan demikian, komponen proses menjadi inti dari strategi manajemen sekolah karena pada tahap inilah integrasi enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancasila dalam Program Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan secara sistematis.

c. *Komponen Output*

Komponen *output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancasila pada Program Pendidikan Anti Korupsi. Sesuai dengan bagan rumusan masalah, *output* yang diharapkan adalah terwujudnya penguatan karakter siswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Penguatan karakter tersebut tercermin dalam perilaku nyata siswa, seperti kepatuhan terhadap aturan sekolah, kejujuran dalam proses belajar, tanggung jawab terhadap tugas, serta sikap etis dalam berinteraksi sosial. Output ini menunjukkan bahwa strategi manajemen sekolah tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa secara nyata.

d. *Komponen Outcome*

Komponen *outcome* menggambarkan dampak jangka panjang dari keseluruhan proses strategi manajemen sekolah. Outcome yang

diharapkan adalah terbentuknya karakter siswa berbasis enam sistem nilai, yaitu nilai teologis, etis, estetis, logis, fisik, dan teleologis, yang terintegrasi dengan kearifan lokal Pancawaluya sebagai sistem nilai yang membudaya dalam kehidupan sekolah.

Nilai teologis tercermin dalam penguatan keimanan, kejujuran, dan kesadaran moral bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban. Nilai etis tampak pada perilaku disiplin, tanggung jawab, adil, dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Nilai estetis terlihat dalam sikap menghargai keindahan, kerapian, dan harmoni lingkungan sekolah. Nilai logis berkembang melalui kemampuan berpikir kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi persoalan. Nilai fisik diwujudkan dalam pembiasaan hidup sehat, tangguh, serta disiplin dalam aktivitas. Sementara itu, nilai teleologis tercermin pada orientasi tujuan hidup yang jelas, kesadaran makna tindakan, dan komitmen terhadap kebaikan bersama.

Outcome tersebut tercermin pada terbentuknya siswa yang memiliki kepribadian *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, dan *singer*, serta tumbuhnya budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan etika antikorupsi. Dalam kerangka Enam Sistem Nilai, integritas berakar pada nilai teologis (kesadaran pertanggungjawaban moral kepada Tuhan), diperkuat oleh nilai etis–hukum (kepatuhan terhadap norma dan aturan), serta dimantapkan melalui nilai teleologis (orientasi pada tujuan hidup yang bermakna dan berkeadaban).

Sementara itu, transparansi berkaitan erat dengan nilai logis–rasional, yang menuntut kejelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban berbasis akal sehat, serta didukung oleh nilai etis–hukum yang menjamin kejujuran dan keadilan dalam setiap proses. Adapun etika antikorupsi merupakan sintesis dari nilai teologis (moralitas spiritual), nilai etis–hukum (kebenaran normatif), dan nilai estetis (harmoni, keteraturan, dan kepantasan dalam perilaku sosial),

sehingga membentuk budaya sekolah yang bersih, tertib, dan berintegritas.

Selain itu, outcome ini ditandai oleh terbangunnya sinergi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, proses internalisasi nilai tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi berlanjut dalam kehidupan sosial siswa secara lebih luas dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, outcome tersebut menjadi indikator keberhasilan jangka panjang dari strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai (teologis, etis–hukum, estetis, logis–rasional, fisik, dan teleologis) dengan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi untuk memperkuat karakter siswa di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Kabupaten Purwakarta.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan langkah strategis untuk memperjelas arah, ruang lingkup, dan fokus penelitian agar kajian yang dilakukan tidak melebar ke aspek-aspek yang berada di luar tujuan penelitian. Pembatasan ini dilakukan terhadap faktor, aspek, dan variabel yang berkaitan dengan subjek, objek, serta fokus kajian, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara lebih terarah, mendalam, dan sistematis. Melalui pembatasan masalah, hasil penelitian diharapkan memiliki ketepatan analisis dan relevansi yang kuat terhadap tujuan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya penguatan karakter siswa sekolah dasar. Kajian tidak diarahkan pada seluruh aspek pendidikan karakter secara umum, melainkan dibatasi pada aspek

manajerial sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta perumusan solusi dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian, untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup kajian, maka penelitian ini dibatasi pada fokus masalah dengan indikator-indikator sebagai berikut.

a. Perencanaan (*Planning*) Strategi Manajemen Sekolah

Perencanaan strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi dibatasi pada indikator:

- 1) perumusan tujuan Program Pendidikan Anti Korupsi berbasis enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya;
- 2) identifikasi dan analisis kebutuhan sekolah serta karakter siswa;
- 3) perumusan nilai-nilai kearifan lokal Pancawaluya dan nilai-nilai antikorupsi yang diintegrasikan dalam program;
- 4) penyusunan program dan rencana operasional (action plan);
- 5) penetapan jadwal kegiatan program; dan
- 6) perencanaan pembiayaan serta sumber daya pendukung program.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) Strategi Manajemen Sekolah

Pengorganisasian strategi manajemen sekolah dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi dibatasi pada:

- 1) pembentukan dan struktur organisasi pelaksana program di sekolah;
- 2) pembagian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak terkait; dan

- 3) penetapan mekanisme kerja, koordinasi, dan prosedur pelaksanaan program.

c. Pelaksanaan (*Actuating*) Strategi Manajemen Sekolah

Pelaksanaan strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada Program Pendidikan Anti Korupsi dibatasi pada:

- 1) sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Pancawaluya dan nilai antikorupsi kepada siswa;
- 2) penerapan strategi pelaksanaan program melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah;
- 3) keterlibatan kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program; dan
- 4) pembiasaan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam aktivitas sekolah sehari-hari.

d. Evaluasi dan Pengendalian (*Controlling*) Strategi Manajemen Sekolah

Evaluasi dan pengendalian strategi manajemen sekolah dalam Program Pendidikan Anti Korupsi dibatasi pada:

- 1) pemantauan dan pendokumentasian pelaksanaan program;
- 2) evaluasi ketercapaian tujuan program dalam penguatan karakter siswa;
- 3) pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan program; dan
- 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan.

e. Kendala dalam Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi

Kendala penelitian dibatasi pada hambatan yang dihadapi sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi Program Pendidikan Anti Korupsi berbasis enam

sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Kabupaten Purwakarta.

f. Solusi dalam Mengatasi Kendala Implementasi Program

Solusi dibatasi pada strategi dan upaya manajerial yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal Pancawaluya guna memperkuat karakter siswa secara berkelanjutan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan sistematis mengenai strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered, Purwakarta, dalam rangka penguatan karakter siswa. Penelitian diarahkan untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana sekolah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program PAK yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai strategi pembentukan karakter siswa.

Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh gambaran utuh mengenai integrasi nilai-nilai Pancawaluya, meliputi: religiusitas (*cageur*), kecerdasan dan nalar (*bageur*), moralitas dan kejujuran (*bener*), ketangguhan dan kemandirian (*pinter*), kepedulian sosial (*singer*), serta tanggung jawab dan integritas (*tapak*). Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu

membentuk program Pendidikan Anti Korupsi yang bermakna, kontekstual, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada terbentuknya karakter siswa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, berintegritas, dan berkepribadian luhur sesuai filosofi Pancasila.

2) Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mendeskripsikan perencanaan manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancasila pada program Pendidikan Anti Korupsi di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered.
- b) Menganalisis proses pengorganisasian sumber daya, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan unsur kearifan lokal, dalam mendukung pelaksanaan program PAK berbasis Pancasila.
- c) Menggambarkan pelaksanaan program PAK yang diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah sebagai upaya penguatan karakter siswa berbasis Pancasila.
- d) Mengetahui mekanisme evaluasi program PAK berbasis kearifan lokal yang dilakukan sekolah untuk menilai efektivitas penguatan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila.
- e) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi manajemen sekolah untuk mengintegrasikan kearifan lokal Pancasila pada program PAK.
- f) Mendeskripsikan solusi dan strategi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala tersebut guna

meningkatkan efektivitas penguatan karakter siswa melalui integrasi enam sistem nilai Pancawaluya dalam program Pendidikan Anti Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah dalam bidang manajemen pendidikan, pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi. Temuan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada program Pendidikan Anti Korupsi, khususnya dalam upaya penguatan karakter siswa di jenjang sekolah dasar.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperdalam pemahaman konseptual tentang penerapan nilai-nilai Pancawaluya yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi manajemen sekolah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan model teoretis manajemen pendidikan karakter yang kontekstual, berakar pada budaya lokal, dan relevan dengan dinamika sosial serta budaya masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur akademik terkait pendidikan anti korupsi di sekolah dasar yang dikaji melalui perspektif strategi manajemen sekolah berbasis kearifan lokal Pancawaluya, yang hingga saat ini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kerangka teoretis maupun kebijakan pendidikan karakter yang menempatkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter siswa yang berintegritas secara berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah dalam bidang manajemen pendidikan, pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi. Temuan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai pengelolaan program pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal, khususnya dalam upaya menguatkan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada jenjang sekolah dasar.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperdalam pemahaman konseptual tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan Pancasila ke dalam fungsi-fungsi manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan model teoretis manajemen pendidikan karakter yang kontekstual, berakar pada budaya lokal, serta relevan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur akademik terkait pendidikan anti korupsi di sekolah dasar yang dikaji melalui perspektif manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal, yang hingga saat ini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kerangka teoretis maupun kebijakan pendidikan karakter yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter siswa yang berintegritas secara berkelanjutan.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam penguatan karakter siswa melalui program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yang terintegrasi dengan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancasila.

1) Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan rujukan praktis bagi kepala sekolah dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan strategi manajemen sekolah yang mengintegrasikan kearifan lokal serta nilai-nilai Pancawaluya ke dalam program PAK. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program penguatan karakter siswa secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan.

2) Bagi Guru

Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan panduan praktis dalam mengimplementasikan program PAK berbasis kearifan lokal Pancawaluya ke dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Temuan ini dapat membantu guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancawaluya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mendukung pembentukan karakter siswa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, berintegritas, dan peduli terhadap lingkungan sosial.

3) Bagi Siswa

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui integrasi PAK dengan enam sistem nilai Pancawaluya, siswa diharapkan mampu mengembangkan karakter positif, seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, integritas, dan kemandirian, yang menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Bagi Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pendidikan karakter, khususnya dalam pengelolaan PAK berbasis kearifan lokal. Temuan penelitian dapat mendorong sekolah untuk mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai bagian dari sistem

manajemen sekolah, sehingga tercipta budaya sekolah yang berkarakter, berintegritas, dan berkelanjutan.

5) Bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kebijakan

Bagi dinas pendidikan dan pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi empiris dalam merumuskan kebijakan serta program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Temuan penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan PAK yang kontekstual, efektif, dan sesuai dengan karakteristik budaya daerah.

6) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah dan bahan perbandingan dalam mengembangkan penelitian lanjutan terkait strategi manajemen sekolah, integrasi nilai Pancawaluya, pendidikan anti korupsi, dan penguatan karakter siswa, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang lainnya, sehingga memperluas kajian empiris dan teoritis di bidang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perencanaan strategi manajemen sekolah dalam mengintegrasikan enam sistem nilai dan kearifan lokal Pancawaluya pada program Pendidikan Anti Korupsi di SDN 1 Linggarsari dan SDN 3 Plered Purwakarta untuk penguatan karakter siswa?
- b) Bagaimana pengorganisasian sumber daya sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta unsur kearifan lokal, dalam mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi berbasis Pancawaluya?

- c) Bagaimana pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah untuk menguatkan karakter siswa sesuai enam sistem nilai Pancasila?
- d) Bagaimana mekanisme evaluasi program Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal dilakukan untuk menilai efektivitas penguatan karakter siswa berbasis nilai-nilai Pancasila?
- e) Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam penerapan strategi manajemen yang mengintegrasikan kearifan lokal Pancasila pada program Pendidikan Anti Korupsi?
- f) Bagaimana solusi atau strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala dalam penerapan manajemen kearifan lokal Pancasila guna meningkatkan efektivitas penguatan karakter siswa melalui program Pendidikan Anti Korupsi?